

**PENGARUH SEKTOR PARIWISATA, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB), TINGKAT INVESTASI DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN 2010-2014
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta)**



PUBLIKASI ILMIAH

**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

AISYAH KAMILA

B200120193

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH SEKTOR PARIWISATA, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB), TINGKAT INVESTASI DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2010-2014
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

AISYAH KAMILA

B200120193

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Erma Setiawati, Ak.MM)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH SEKTOR PARIWISATA, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB), TINGKAT INVESTASI DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2010-2014
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Oleh:

AISYAH KAMILA

B200120193

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 23 April 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji :

1. Dr. Erma Setiawati, Ak.MM

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Dr. Zulfikar, SE, M.Si

(Anggota 1 Dewan Penguji)

()

3. Atwal Arifin, Drs, Akt

(Anggota 2 Dewan Penguji)

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE. MSi.)

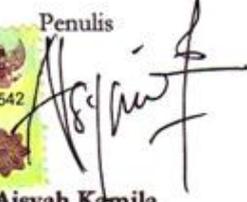
Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah dijukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah ditulis atau orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka .

Apabila tidak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 April 2016

METERAI
TEMPEL
18FBDA6F603985542
6000
LAPIS RIBU RUPIAH

Penulis

Aisyah Kamila
B 200120193

**PENGARUH SEKTOR PARIWISATA, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB),
TINGKAT INVESTASI DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2010-2014
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta)**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sektor pariwisata, produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat investasi, jumlah penduduk terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Eks Karesidenan Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun instansi-instansi terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota Eks Karesidenan Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak tujuh daerah selama lima tahun. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji F, uji koefisien determinasi R^2 , dan uji t.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, Sedangkan variabel produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian pada variabel tingkat investasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Abstract

The purposes of this research are to find out and analyze the impact of tourism sector, gross regional of domestic product (PDRB), investment level, the number of people toward the increase of local own source revenue (PAD) in ex region of Karesidenan Surakarta. This research uses quantitative method with secondary data obtained of statistical center body (BPS) and also relevant institutions. Population in this research is all sub-province/city of ex region of Karesidenan Surakarta. Amount of sample in this research is seven of area during five year. Sampling method used in this research is sampling. Data analysis was performed by multiple linier regression analysis. Based on data analysis could be concluded that tourism sector variable do not have an effect on to local own source revenue. While gross regional of domestic product variable have an effect on tolocal own source revenue. Then at mount investment level variable have an effect on to local own source revenue. Hereinafter the amount of resident have an effect on tolocal own source revenue.

Keyword: *Tourism sector, gross regional of domestic product, investment level, number of people, local own source revenue*

PENDAHULUAN

Pariwisata banyak di kembangkan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu primadona penghasil devisa. Pariwisata sebagai industri yang ramah lingkungan juga sering disebut sebagai industri tanpa cerobong asap jika dibandingkan dengan industri berat lainnya yang banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Menurut MC Intosh dan Goeldner dalam Subakti (2008) dalam Ni Luh Sili Antari (2013) pariwisata sebagai keseluruhan fenomena dan hubungan-hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, pemasok bisnis, pemerintah, dan masyarakat penerima dalam proses penciptaan daya tarik dan upaya menjamu para wisatawan dan pengunjung lainnya.

Dalam rangka pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan yang menentukan dan dapat sebagai katalisator untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utama (Salah, 2003) dalam Ni Luh Sili Antari (2013).

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah (Santosa dkk, 2005) dalam Pande Paramitha Wulandari dan Anak Agung Ketut Ayuningsasi (2014). Hal ini berarti semakin besar PAD maka daerah tersebut semakin mandiri yang ditunjukkan oleh ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang semakin berkurang. Namun pada kenyataannya, daerah masih dihadapkan pada ketergantungan fiskal berupa subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat yang

disebabkan oleh keterbatasan PAD. Salah satu cara untuk mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan memperhatikan besarnya jumlah PAD yang dapat diperoleh oleh suatu daerah (Nasrun, 2009) dalam Pande Paramitha Wulandari dan Anak Agung Ketut Ayuningsasi(2014).

PAD merupakan barometer utama atas suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat (Hidayat dkk, 2007). Ketergantungan kepada subsidi dari pemerintah pusat harus diminimalkan, sehingga nantinya PAD yang khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah menjadi sumber keuangan terbesar dalam PAD (Koswara, dalam Wulandari dan Ayuningsasi 2014).

Pengembangan industri pariwisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam usaha mengembangkan obyek-obyek wisata sehingga menarik wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Jumlah kunjungan wisata sangat tergantung kepada keindahan obyek wisata baik yang telah dikelola maupun yang tersedia secara alami.

Setiap pemerintah daerah berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Untuk itu diperlukan adanya kreatifitas, inovasi dan pemikiran yang dinamis untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dari masing-masing potensi daerah yang dimiliki.

Meskipun daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah namun masih banyak juga sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Perbedaan kondisi daerah satu dengan daerah yang lainnya membuat kebijakan yang diterapkan juga harus berbeda antar satu daerah dengan lainnya. Menurut Halim dalam Wulandari dan Ayuningsasi (2014), bahwa ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi potensi sumber-sumber PAD antara lain, PDRB perkapita dan tingkat inflasi.

Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (Sukirno) dalam Jaya dan Widanta (2014).

Menurut Jhingan dalam Wulandari dan Ayuningsasi (2014) sesuai dengan teori pertumbuhan dari Harrod-Domar bahwa investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian.

Menurut (Todaro) dalam Datu (2012) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian kesemuanya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif.

Menurut Kuncoro dalam Datu (2012) penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/ kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat mencolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membiayai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sektor pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat investasi, dan jumlah penduduk terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KAJIAN LITERATUR DANPENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stakeholder

Istilah *stakeholder* dari defenisi Gray dalam Retno dan Priantinah (2012) menyatakan bahwa *stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan atau organisasi yang dapat

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan atau organisasi. Para *stakeholder* antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain. “Menurut Ghozali dan Chairiri dalam Riswari (2012) *stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (*stakeholders*, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan atau organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan atau organisasi tersebut. Setiap *stakeholder* memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap pengukuran kinerja keuangan (Mahsun) dalam Riswari (2012).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Samsubar (2003) pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, selanjutnya disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (2) jasa giro, (3) pendapatan bunga, (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah. Dari kelima komponen lain-lain PAD tersebut merupakan sumber keuangan daerah dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan “Lain-lain PAD yang sah” antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah.

Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah sah. Menurut Siagian (2000) pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD menurut Thamrin (2001) dalam (Muharomah, 2006) ada hal-hal yang perlu diketahui:

1. Kondisi awal suatu daerah
 - a. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan.
 - b. Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD
3. Perkembangan PDRB per kapita riil
Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pertumbuhan Penduduk
Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat.
5. Tingkat Inflasi
Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel
6. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap, maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi.

7. Pembangunan Baru

Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

8. Sumber Pendapatan Baru

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer/ internet dan lain-lain.

9. Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi jelas akan meningkatkan PAD.

Sektor Pariwisata

Yoeti (1996:10) menyebutkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Wisata adalah berpergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dsb.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata
2. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai
3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut (Saberan, 2002: 5) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu produk yang artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, domestik yang artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, regional yang artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan, dan bruto yang maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan empat pengertian istilah di atas, maka arti PDRB adalah sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran. PDRB dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu; upah/ gaji, sewa tanah, dan keuntungan usaha, dan PDRB dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga, pemerintah maupun lembaga (*non profit*) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Tingkat Investasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, definisi penanaman modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa investasi terbagi menjadi dua, yaitu PMDN dan PMA yang dapat

didefinisikan sebagai berikut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Sukirno (2004) investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Sedangkan menurut Case and Fair (2007), investasi adalah aliran yang meningkatkan persediaan modal. Meskipun modal diukur pada titik waktu tertentu (suatu persediaan), investasi diukur atas periode waktu (suatu aliran). Aliran investasi meningkatkan persediaan (simpanan) modal.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan investasi di industri pariwisata adalah realisasi investasi baik PMDN ataupun PMA yang ditanamkan dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan industri pariwisata, yaitu investasi pada jasa agen perjalanan, hotel bintang, restoran dan penyediaan makanan keliling, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa biro perjalanan wisata, kegiatan hiburan, serta kegiatan kesenian dan kreativitas.

Jumlah Penduduk

Menurut (Budiharjo, 2003:159) mengatakan bahwa, jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban. Pembangunan sebagai asset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah yang terdiri dari: sektor pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat investasi, dan jumlah penduduk telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti ditunjukkan berikut ini:

Antari (2013) meneliti tentang peran industri pariwisata terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independennya adalah jumlah kunjungan wisatawan domestik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan retribusi obyek dengan mengambil sampel Kabupaten Gianyar tahun 2000-2010 kunjungan wisatawan domestik berperan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar, terbukti bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik berperan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar, dan terbukti bahwa retribusi obyek wisata berperan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar.

Sari (2013) meneliti tentang analisis variabel-variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independennya adalah kunjungan wisatawan, investasi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan mengambil sampel Provinsi Bali Periode 1991-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat investasi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 1991-2009. Dan prospek perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

Rantetadung (2012) meneliti tentang analisis pengaruh dukungan pemerintah dan kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Nabire. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independennya adalah dukungan pemerintah dan kunjungan wisatawan dengan mengambil sampel di Kabupaten Nabire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD sektor pariwisata, kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan PAD sektor pariwisata.

Jaya dan Widanta (2014) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independennya adalah PDRB, jumlah penduduk, jumlah wisatawan dengan mengambil sampel Kota Denpasar tahun 1997-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah wisatawan tidak

berpengaruh terhadap PAD kota Denpasar, selanjutnya PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kota Denpasar, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD kota Denpasar. Maka dengan mengintensifkan pengawasan wajib pajak bagi para penduduk yang berada pada umur produktif akan mampu meningkatkan PAD.

Wulandari dan Ayuningsasi (2014) meneliti tentang analisis variabel-variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independennya adalah pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, otonomi daerah dengan mengambil sampel di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, dan otonomi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Bali. Hasil pengolahan data secara parsial diperoleh hasil bahwa pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali, sedangkan tingkat inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali. Otonomi daerah secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali.

Muchtolifah (2010) meneliti tentang analisis beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independennya adalah jumlah perusahaan, tingkat inflasi, jumlah hotel, jumlah pelanggan listrik dengan mengambil sampel di Kota Surabaya tahun 1994-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah perusahaan, tingkat inflasi, jumlah hotel dan jumlah pelanggan listrik secara simultan berpengaruh nyata terhadap PAD di Kota Surabaya. Sedangkan secara parsial jumlah pelanggan listrik berpengaruh nyata terhadap PAD di Kota Surabaya. Sedangkan jumlah perusahaan, tingkat inflasi dan jumlah hotel tidak berpengaruh nyata terhadap PAD di Kota Surabaya karena pemerintah belum sepenuhnya dalam menjalankan suatu kebijakan agar kondisi perekonomian bisa stabil dan proses perijinan yang tidak rumit sehingga para investor dapat menanamkan modalnya di Surabaya.

Pengembangan Hipotesis

Sektor Pariwisata Berpengaruh Terhadap PAD

Hubungan antara sektor pariwisata dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapatkan prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD.

Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita, besar kecilnya pajak hotel dan restoran, dan besar kecilnya retribusi obyek wisata.

Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utama. Gafur (2008) yang meneliti Analisis Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung, penelitian tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata.

H₁ : Sektor pariwisata berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berpengaruh Terhadap PAD

Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB (Produk Domestik Regional bruto) suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahannya. Ini berarti PDRB (Produk Domestik Regional

Bruto) merupakan salah satu komponen penting untuk mengetahui potensi daerah sebagai upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H₂: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat Investasi Berpengaruh Terhadap PAD

Hubungan antara tingkat investai dengan PAD sangat erat dan menguntungkan, karena kebanyakan analisis mengenai penentuan pendapatan pada umumnya dianggap investasi yang dilakukan adalah berbentuk investasi otonomi. Tingkat pendapatan nasional atau pendapatan daerah yang tinggi disebabkan karena membesarnya pendapatan masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi (Sukirno, 2004). Dengan kata lain, apabila pendapatan bertambah maka investasi juga ikut meningkat dan begitu juga sebaliknya.

Besarnya investasi tersebut tergantung dari laju pertumbuhan pendapatan dan *capital output rasio*. Dengan kata lain, laba sebagai imbalan jasa modal ditentukan oleh laju pertumbuhan produksi dan pendapatan.

H₃: Tingkat Investasi berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap PAD

Hubungan antara jumlah penduduk dengan PAD juga sangat erat, karena jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Budiharjo, 2003:159) mengatakan bahwa, jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai *asset* modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban. Pembangunan sebagai *asset* apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

H₄: Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/ kota yang terdaftar di Eks Karesidenan Surakarta selama periode 2010 sampai 2014. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel, maka ditentukan beberapa kriteria dalam penentuan sampel berdasarkan teknik *purposive sampling* antara lain:

1. Kabupaten/ kota yang terdaftar dalam daerah Eks Karesidenan Surakarta.
2. Kabupaten/ kota yang sedang dalam kondisi baik pada periode penelitian tersebut.
3. Kabupaten/ kota yang mencatat data yang berkaitan dengan variabel yang bersangkutan selama periode penelitian dan datanya lengkap untuk dianalisis

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data tersebut bersumber dari:

1. Buku-buku ataupun berupa jurnal, laporan-laporan hasil penelitian yang pernah dilakukan, sepanjang masih ada hubungannya dengan tujuan penelitian ini agar diperoleh hasil yang lebih baik.
2. Data-data dari BPS maupun instansi-instansi terkait yang berkaitan dalam menunjang dan pencapaian tujuan.

Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional Variabel Dependen (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rumus untuk menghitung PAD, yaitu:

PAD = Pajak daerah + Restribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan asli daerah diukur dengan menggunakan skala logaritma natural. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah dengan menggunakan nominal angka (rupiah) dengan penyederhanaan skala logaritma natural sehingga bisa diperhitungkan jumlahnya.

**Variabel Independen
Sektor Pariwisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jadi pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusia ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam dengan tujuan perjalanannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan.

Pengukuran pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata berdasarkan pada indikator berikut:

1. Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata
Pendapatan dari sektor pariwisata yang termasuk dalam penerimaan daerah tahun 2010-2014 diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi, pendapatan lain yang sah.
2. Jumlah Obyek Wisata
Merupakan banyaknya obyek wisata yang ada di kabupaten/ kota di wilayah Eks Karesidean Surakarta tahun 2010-2014
3. Jumlah Wisatawan
Merupakan besarnya jumlah wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang berkunjung ke wilayah Eks Karesidenan Surakarta tahun 2010-2014
4. Tingkat Hunian Hotel
Banyaknya jumlah kamar hotel berbintang dan melati yang terjual atau terhuni di wilayah Eks Karesidenan Surakarta tahun 2010-2014.

Sektor pariwisata diukur berdasarkan indikator-indikator dengan menggunakan skala nominal. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya indikator-indikator sektor pariwisata yang diterima oleh Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah dengan menggunakan nominal angka dengan penyederhanaan skala logaritma natural sehingga bisa diperhitungkan jumlahnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sukirno, (2004) PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut. Rumus yang digunakan untuk perhitungannya adalah:

$$N = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Keterangan:

N = Nilai Produksi

PDRB₁ = PDRB Menurut Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB₀ = PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diukur dalam satuan juta rupiah per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diterima oleh Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah dengan menggunakan nominal angka (rupiah) dengan penyederhanaan skala logaritma natural sehingga bisa diperhitungkan jumlahnya

Tingkat Investasi

Menurut Sukirno (2004) investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Sedangkan menurut Case and Fair (2007), investasi adalah aliran yang meningkatkan persediaan modal. Meskipun modal diukur pada titik waktu tertentu (suatu persediaan), investasi diukur atas periode waktu (suatu aliran). Aliran investasi meningkatkan persediaan (simpanan) modal. Rumus yang digunakan untuk perhitungannya adalah:

$$ROI = \frac{\text{Pendapatan yang dihasilkan}}{\text{Modal yang ditanam}}$$

Tingkat investasi diukur dengan menggunakan satuan juta rupiah per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya tingkat investasi berdasarkan sirkulasinya di Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah dengan menggunakan nominal angka (rupiah) dengan penyederhanaan skala logaritma natural sehingga bisa diperhitungkan jumlahnya.

Jumlah Penduduk

Kependudukan dalam bahasa Yunani *Demos* yang artinya rakyat atau penduduk yang merupakan hal penting di dalam pembangunan ekonomi yang merupakan penggerak dan pelaksanaan ekonomi di samping sebagai sumber tenaga kerja. Penduduk dalam suatu wilayah dapat dilihat dan dari aspek positif dan negatif. Aspek positif dimana penduduk yang besar akan mampu mendorong pembangunan di suatu wilayah itu sendiri, apabila diiringi dengan perluasan wilayah kesempatan kerja yang semakin besar. Oleh karena itu jumlah penduduk di suatu wilayah mempunyai arti yang sangat penting terutama dengan membuat suatu perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih realistis. Dampak negatif pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya permintaan layanan sosial dan ekonomi untuk memenuhi hak-hak dasar mereka yang jumlahnya meningkat. Pertumbuhan penduduk total dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$P = (L - M) + (I - E)$$

Keterangan:

- P = Pertumbuhan penduduk total
- L = Jumlah kelahiran
- M = Jumlah kematian
- I = Jumlah imigrasi
- E = Jumlah emigrasi

Jumlah penduduk diukur dengan menggunakan satuan jiwa per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk yang berada dalam wilayah Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah dengan menggunakan satuan jiwa dengan penyederhanaan skala logaritma natural sehingga bisa diperhitungkan jumlahnya.

Analisis Regresi Berganda

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), sehingga model persamaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1 RSP + \beta_2 IW + \beta_3 PDRB + \beta_4 TI + \beta_5 JP + e$$

Dimana:

- PAD = PAD Kabupaten/Kota
- α = Konstanta
- β_1 - β_4 = Koefisien
- RSP = Restribusi Sektor pariwisata
- IW = Intensitas Wisata
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- TI = Tingkat Investasi
- JP = Jumlah Penduduk
- e = Error Term

Uji F (Uji Simultan)

Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan *level of significance* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel} (\alpha; k-1; n-k)$ atau nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi fit dan variabel independennya secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependennya. (Ghozali, 2011 : 98).

Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu sektor pariwisata, (PDRB), tingkat investasi dan jumlah penduduk terhadap penerimaan daerah di Eks Karesidenan Surakarta terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi (R²).

Koefisien Determinasi (R²) yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R² yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Akan tetapi ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi terjadi bias terhadap satu variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen akan menyebabkan peningkatan R², tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (memiliki nilai t yang signifikan).

Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Dalam penelitian ini menggunakan *level of significance* 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Adapun kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai sign > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai sign < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan besarnya pengaruh antara variabel independen yang menyatakan terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. Dapat ditunjukkan hasil rangkuman analisis regresi linear berganda seperti pada tabel berikut :

Tabel Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	β	t _{hitung}	Sig
Konstanta	8,846	1,348	0,188
Sektor Pariwisata	-0,062	-1,185	0,245
Produk Domestik Regional Bruto	0,915	2,569	0,015
Tingkat Investasi	0,285	2,561	0,016
Jumlah Penduduk	-0,741	-2,136	0,041
R ²	= 0,739	F _{hitung}	= 21,216
Adjusted R ²	= 0,704	Sig. F / Prob	= 0,000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Pada penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linier berganda yaitu, sebagai berikut:

$$PAD = 8,846 - 0,062 SP + 0,915 PDRB + 0,285 TI - 0,741 JP + \epsilon$$

Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 8,846. Hal ini menunjukkan bahwa jika sektor pariwisata, produk domestik regional bruto, tingkat investasi dan penduduk dianggap konstan maka besarnya pendapatan asli daerah akan bertambah sebesar 8,846. Koefisien regresi sektor pariwisata sebesar -0,062. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi penurunan terhadap sektor pariwisata sebesar 1% maka akan berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah sebesar 0,062. Koefisien regresi produk domestik regional bruto sebesar 0,915. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap produk domestik

regional bruto sebesar 1% maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0,915. Koefisien regresi tingkat investasi sebesar 0,285. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap tingkat investasi sebesar 1% maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0,285. Koefisien regresi jumlah penduduk sebesar -0,741. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi penurunan terhadap jumlah penduduk sebesar 1% maka akan berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah sebesar 0,741.

Uji Regresi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara serentak diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 21,216 > nilai F_{tabel} sebesar 2,55 dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan sektor pariwisata, produk domestik regional bruto, tingkat investasi dan jumlah penduduk berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini juga bisa diartikan bahwa model regresi yang digunakan sudah sesuai (fit) dengan datanya.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian dengan analisis regresi berganda yang telah dilakukan diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,704. Hal ini artinya bahwa 70,4% variasi dari pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh redistribusi sektor pariwisata, intensitas wisata, produk domestik regional bruto, tingkat investasi dan jumlah penduduk. Sedangkan selebihnya 29,6% dari pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t digunakan untuk menguji masing-masing variabel independen secara individual (parsial) dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata dengan *level of significance* 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Pengujian Terhadap Sektor Pariwisata

Berdasarkan hasil pengujian uji t untuk variabel sektor pariwisata diperoleh t_{hitung} sebesar -1,185 < t_{tabel} sebesar 2,045 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,245 > *p-value* sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka H_1 ditolak. Hal tersebut berarti sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan sektor pariwisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tidak terbukti.

Pengujian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan hasil pengujian uji t untuk variabel produk domestik regional bruto diperoleh t_{hitung} sebesar 2,569 > t_{tabel} sebesar 2,045 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 < *p-value* sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka H_2 diterima. Hal tersebut berarti produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah terbukti.

Pengujian Terhadap Tingkat Investasi

Berdasarkan hasil pengujian uji t untuk variabel tingkat investasi diperoleh t_{hitung} sebesar 2,561 > t_{tabel} sebesar 2,045 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 < *p-value* sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka H_3 diterima. Hal tersebut berarti tingkat investasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan tingkat investasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah terbukti.

Pengujian Terhadap Jumlah Penduduk

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel jumlah penduduk diperoleh t_{hitung} sebesar -2,136 > t_{tabel} sebesar 2,045 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,041 < *p-value* sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka H_4 diterima. Hal tersebut berarti jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah terbukti.

DISKUSI

Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Hasil analisis data di atas, variabel sektor pariwisata memiliki memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,245. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Tampak jelas bahwa sektor pariwisata bukanlah sektor yang mendapatkan prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing. Dengan demikian sektor pariwisata tidak mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Hal ini disebabkan oleh kurangnya usaha dari pemerintah daerah menggalakkan promosi kepariwisataan secara kolektif, kurangnya penataan yang baik di seluruh obyek wisata, kurangnya koordinasi pemerintah dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata, serta diharapkan pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak hotel agar setiap wisatawan yang menginap bisa diberikan fasilitas berwisata keseluruhan obyek wisata di kabupaten/ kota Eks Karesidenan Surakarta agar wisatawan mengetahui tentang pariwisata di daerah tersebut dan bertransaksi misalnya membeli oleh-oleh khas daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchtolifah (2010) yang menyatakan bahwa jumlah hotel tidak berpengaruh nyata terhadap PAD, serta diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Widanta (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD kota Denpasar.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap PAD

Hasil analisis data di atas, variabel produk domestik regional bruto memiliki memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan semakin banyak jumlah PDRB maka jumlah PAD juga akan semakin meningkat, karena PDRB selain merupakan indikator pertumbuhan ekonomi juga sebagai indikator tingkat kemakmuran. Dengan kata lain semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Ini berarti PDRB merupakan salah satu komponen penting untuk mengetahui potensi daerah sebagai upaya penerimaan PAD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang menyatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi Bali, serta diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Widanta (2014) yang menyatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kota Denpasar.

Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap PAD

Hasil analisis data di atas, variabel tingkat investasimemiliki memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,016. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat investasiberpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan bahwa dengan penataan yang baik dan menjadikan investasi menjadi meningkat, maka pendapatan juga akan ikut bertambah. Dengan kata lain, laba sebagai imbalan jasa modal ditentukan oleh laju pertumbuhan produksi dan pendapatan. Meningkatnya produktivitas marginal dari modal akan mendorong bertambahnya investasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang menyatakan bahwa tingkat investasiberpengaruh berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 1991-2009, serta diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Ayuningsasi (2014) yang menyatakan bahwa tingkat investasiberpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Hasil analisis data di atas, variabel jumlah penduduk memiliki memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,041. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi salah satu sumber pendapatan jika dikelola dengan benar dan sebaliknya akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun dipandang sebagai aset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchtolifah (2010) yang menyatakan bahwa secara parsial jumlah pelanggan listrik berpengaruh nyata terhadap PAD di Kota Surabaya

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian variabel tingkat investasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik tidak hanya dengan data secara statistik saja, namun bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang pendapatan asli daerah, penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah variabel independen lainnya dan juga variabel moderating maupun intervening yang diduga mampu menjelaskan secara maksimal variasi terhadap variabel dependen, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder laporan data sensus terbaru dan termutakhir yang didapatkan dari BPS, tetapi juga melalui metode observasi atau pengamatan dan adanya wawancara terhadap obyek secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Wulandari, Pande Paramitha dan Anak Agung Ketut Ayuningsari. 2014. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Volume 3. Nomor 11.
- Antari, Ni Luh Sili. 2013. Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*. Volume 3. Nomor 1.
- Hidayat, Paidi & Pratomo, Wahyu Ario & Harjito D. Agus. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol 12 No 3, Desember 2007: 213-222.
- Jaya, Gde Bhaskara Perwira dan A.A Bagus Putu Widanta. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Volume 3. Nomor 5.
- Datu, Indra rindu. 2012. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan (PAD) di Makassar Tahun 1999-2009*. Universitas Hasanuddin Makassar. *Skripsi*.
- Retno, R. D. M., dan Denies Priantinah. 2012. Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012). *Jurnal Ilmiah*. Vol. XIX No.1. Malang.
- Riswari, Dyah Ardana. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Samsubar, Saleh. 2003. “Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia”. *Jurnal Media Ekonomi & Bisnis*. Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Muharomah, Siti. 2006. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan STIE MDP.
- Yoeti, H. Oka A. 1996. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramaita.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
- Saberan, H. 2002. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Cetakan Ke Limabelas: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Case and Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Edisi kelima. Jakarta: Indeks.
- Budiharjo, Ari. 2003. Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah. *Tesis* Pasca Sarjana UNDIP. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sari, Putu Lia Perdana. 2013. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Volume 2. Nomor 2.
- Rantentadung. 2012. Analisis Pengaruh Dukungan Pemerintah dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire. *Jurnal Agroforestri*. Volume 7. Nomor 1.
- Muchtolifah. 2010. Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi PAD di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*. Volume 1. No. 2.
- Gafur, Juliafitri Dj. 2008. "Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung". Medan: Universitas Sumatera Utara. *Tesis*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Cetakan V. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.